

## Abstraksi

Skripsi ini bertujuan untuk mencari alasan di balik berubahnya posisi India dalam menanggapi isu perlindungan hak-hak intelektual yang diatur dalam negosiasi *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Ketika isu perlindungan hak-hak intelektual pertama kali dibawa ke GATT di tahun 1986, India mengklaim bahwa perlindungan tersebut tidak diperlukan mengingat besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut dan berbedanya tingkat perkembangan masing-masing negara. Akan tetapi, posisi India ini berubah secara signifikan ketika memasuki Putaran Doha. India tidak saja menyetujui perjanjian TRIPS, namun juga mengusulkan agar aspek lain dari hak intelektual dapat dilindungi, seperti sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan folklor. Berbedanya kedua posisi yang diambil India ini menarik perhatian penulis untuk melakukan riset untuk mencari jawaban dari teka-teki ini. Skripsi ini menggunakan teori *two-level game* yang dipelopori oleh Robert D. Putnam untuk menganalisa tekanan dari level domestik dan internasional yang mendorong India untuk mengambil posisi yang berbeda dalam menanggapi perlindungan hak-hak intelektual tersebut. Skripsi ini mengamati tanggapan aktor pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok bisnis. Temuan pada skripsi ini menunjukkan bahwa India mengubah posisinya dalam menanggapi perjanjian TRIPS karena permintaan domestik, tepatnya permintaan dari perusahaan farmasi dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan penduduk asli, serta didukung oleh aktor-aktor pada level internasional, khususnya negara-negara berkembang. Dukungan dari negara-negara berkembang ini melampaui tekanan dari perusahaan farmasi dari negara maju dan negara-negara maju itu sendiri. Dengan begitu, skripsi ini menunjukkan bahwa, sebagai sebuah negara berkembang, India telah berhasil menegakkan permintaan domestik diatas banyaknya tekanan yang datang dari level internasional.

**Keywords:** bisnis, domestik, GATT, pemerintah, GRTKF, India, NGOs, TRIPS, sudut pandang, internasional.

## Abstract

This thesis aims to explain the rationales to India's shifting standpoint on the protection of intellectual property rights (IPRs) in the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Negotiations (TRIPS) negotiations. When the issue of protecting IPRs was brought to the GATT in 1986, India claimed it as unnecessary given the costly administrative affairs in domesticizing the agreement and the difference in countries' level of development. However, the standpoint of India altered significantly in the Doha Round. India does not only agree to adopt the TRIPS Agreement, but also propose the protection of broader aspects of IPRs, to also include Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (GRTKF). The adoption of these significantly different viewpoints poses the puzzle that this thesis seeks to explain. In doing so, this thesis uses two-level game theory by Robert D. Putnam to analyse both domestic and international pressures that simultaneously push India to alter its position on IPR protection at WTO. It analyses the actions taken by governmental actors, NGOs, and business groups at both domestic and international levels. The findings demonstrate that India adopted different standpoint because of domestic demands, precisely those of the pharmaceutical companies and pro-indigenous people NGOs, while different set of actors, especially developing countries, at international level also supported it. The supports from these actors exceeded the pressures from big pharmaceutical companies from developed countries and the developed countries themselves. By arguing this, this thesis thus suggests that India, as a developing country, has been able to advocate the demand of domestic interests in face of massive international pressures.

**Keywords:** business, domestic, GATT, government, GRTKF, India, NGOs, TRIPS, standpoint, international.